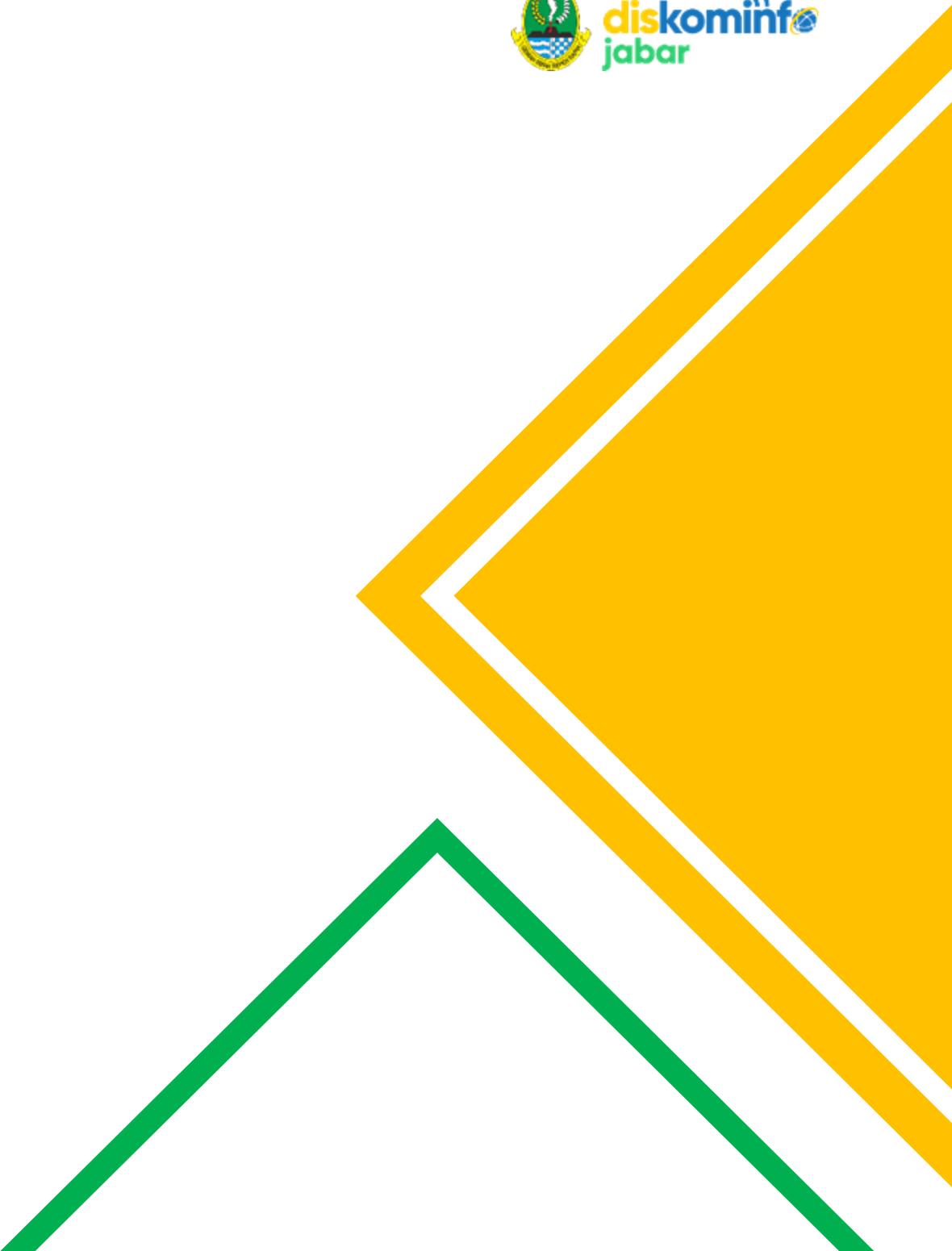




Arahan Teknis Walidata

Disampaikan oleh:
Indah Lesmini, S.Si,
Kepala Bidang Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



PROSES BISNIS E-WALIDATA

TAHAPAN

Berdasarkan Pasal 25 Perpres 39 tahun 2019 tahapan walidata berpedoman pada tahapan SDI

PENANGGUNG JAWAB,
REFERENSI, OUTPUT

PERENCANAAN

Penyusunan daftar data oleh instansi Pusat dan Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia

Penanggung Jawab : Bappeda / Walidata
Referensi : Daftar Data dan Format Perencanaan Data
Output : BA Hasil Perencanaan Data dan dokumen serta rekomendasi pelaksanaan survey

PENGUMPULAN

Pengumpulan Data oleh Produsen Data dengan menyesuaikan standar dan daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, serta jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data

Penanggung Jawab : Produsen Data / Walidata Pendukung
Referensi : BA Hasil Perencanaan
Output : Data Hasil Pengumpulan

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan oleh Walidata dan Pembina Data terhadap kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia

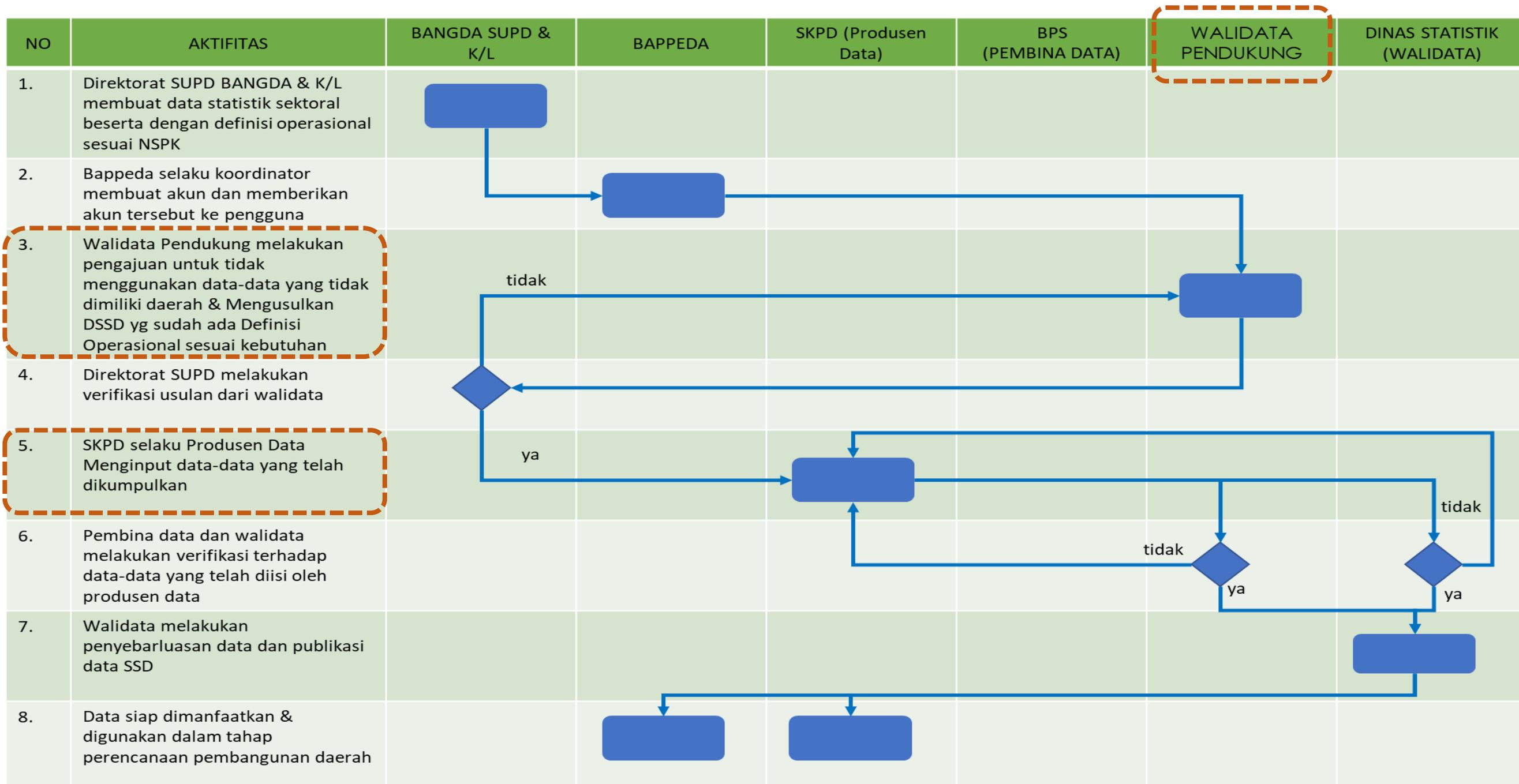
Penanggung Jawab : Walidata
Referensi : BA Hasil Perencanaan Data dan Format Pemeriksaan Data
Output : BA Hasil Pemeriksaan Data

PENYEBARLUASAN

Kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data

Penanggung Jawab : Walidata
Referensi : Struktur Profil Data SSD
Output : BA Hasil Pemeriksaan Data

SOP E-Walidata dalam SIPD



SURAT EDARAN PENGINPUTAN MODUL E-WALIDATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 November 2023

Nomor : 600.3.4/11781/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penginputan Modul E-Walidata
dalam Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)

Yth. 1. Gubernur,
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Sebagai upaya mempersiapkan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, diperlukan penguatan data dan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
 - a. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah melalui suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis elektronik; dan
 - e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:
 - a. Memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk mengimplementasikan SIPD-RI, salah satunya terkait Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dengan memanfaatkan Modul E-Walidata

- pada Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI yang dapat diakses melalui situs laman (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata/>);
- a. Memperkuat Bappeda sebagai pengelola Modul E-Walidata dalam Informasi Pembangunan Daerah SIPD-RI, sebagaimana amanat Pasal 7 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang kemudian dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Statistik sebagai Walidata, dan seluruh Perangkat Daerah sebagai Walidata Pendukung dan Produsen Data;
 - b. Melakukan pengisian DSSD oleh seluruh Perangkat Daerah dalam Modul E-Walidata sesuai proses bisnis yang telah disediakan dengan tahapan yang meliputi, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data;
 - c. Menetapkan DSSD dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan diunggah oleh Walidata ke dalam Modul E-Walidata SIPD-RI sebagai dasar penyebaran data, pemanfaatan data, sekaligus mendukung Satu Data Indonesia (SDI); dan
 - d. Memanfaatkan DSSD dalam Modul E-Walidata untuk menjadi data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi.
3. Untuk mendukung pelaksanaan penginputan Modul E-Walidata dimaksud oleh Pemerintah Daerah, telah disediakan panduan, *manual book*, video tutorial dan daftar *contact person* para pejabat yang dapat diakses pada fitur *Helpdesk* di dalam Modul E-Walidata dalam Informasi Pembangunan Daerah SIPD-RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.

Poin-poin SE dimaksud adalah:

1. **Implementasi E-walidata** dalam SIPD-RI untuk penyelenggaraan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD)
2. **Memperkuat Bappeda** sebagai pengelola Modul E-Walidata
3. Melakukan **pengisian DSSD oleh seluruh Perangkat Daerah** dalam Modul E-Walidata
4. **Menetapkan DSSD** dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan diunggah oleh Walidata ke dalam Modul E-Walidata SIPD-RI
5. **Memanfaatkan DSSD** dalam Modul E-Walidata menjadi data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

SE Mendagri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 Hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

User E-Walidata SIPD

No.	Perangkat Daerah	Username	Password
1	Dinas Pendidikan	jabar_pd_disdik	jabar1.01
2	Dinas Kesehatan	jabar_pd_dinkes	jabar1.02
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	jabar_pd_dbmpr	jabar1.03
4	Dinas Sumber Daya Air	jabar_pd_dsda	jabar1.03
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	jabar_pd_disperkim	jabar1.04
6	Satuan Polisi Pamong Praja	jabar_pd_satpolpp	jabar1.05
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	jabar_pd_bpbd	jabar1.05
8	Dinas Sosial	jabar_pd_dinsos	jabar1.06
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	jabar_pd_disnakertrans	jabar2.07
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	jabar_pd_dp3akb	jabar2.08
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	jabar_pd_dkpp	jabar2.09
12	Dinas Lingkungan Hidup	jabar_pd_dlh	jabar2.11
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jabar_pd_disdukcapil	jabar2.12
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	jabar_pd_dmpd	jabar2.13
15	Dinas Perhubungan	jabar_pd_dishub	jabar2.15
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	jabar_pd_diskominfo	jabar2.16
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	jabar_pd_dkuk	jabar2.17
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	jabar_pd_dpmpstsp	jabar2.18
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	jabar_pd_dispora	jabar2.19
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jabar_pd_dispusipda	jabar2.23
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	jabar_pd_dkp	jabar3.25
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	jabar_pd_disparbud	jabar3.26
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	jabar_pd_dtph	jabar3.27
24	Dinas Perkebunan	jabar_pd_disbun	jabar3.27
25	Dinas Kehutanan	jabar_pd_dishut	jabar3.28
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	jabar_pd_desdm	jabar3.29
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	jabar_pd_disperindag	jabar3.31
28	Sekretariat Daerah	jabar_pd_setda	jabar4.01
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	jabar_pd_setwan	jabar4.02
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	jabar_pd_bappeda	jabar5.01
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	jabar_pd_bpkad	jabar5.02
32	Badan Pendapatan Daerah	jabar_pd_bapenda	jabar5.02
33	Badan Kepegawaian Daerah	jabar_pd_bkd	jabar5.03
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	jabar_pd_bpsdm	jabar5.04
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	jabar_pd_bp2d	jabar5.05
36	Badan Penghubung	jabar_pd_banhub	jabar5.07
37	Inspektorat	jabar_pd_inspektorat	jabar6.01
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	jabar_pd_bakesbangpol	jabar8.01



Keterisian Data E-Walidata SIPD di Jawa Barat

Kode Urusan	Bidang Urusan	Jumlah List data di SIPD	Jumlah Data Terisi Tahun 2022	Persen (%)	Keterangan
1.01	Bidang Pendidikan	325	175	54%	Data terintegrasi dari Dapodik
1.02	Bidang Kesehatan	252	23	9%	
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	436	29	7%	
1.04	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	140	18	13%	
1.05	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	123	0	0%	
1.06	Bidang Sosial	106	44	42%	
2.07	Bidang Tenaga Kerja	53	19	36%	
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24	16	67%	
2.09	Bidang Pangan	64	0	0%	
2.10	Bidang Pertanahan	79	2	3%	
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	167	7	4%	

Lanjutan

Kode Urusan	Bidang Urusan	Jumlah List data di SIPD	Jumlah Data Terisi Tahun 2022	Persen (%)	Keterangan
2.12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	9	24%	
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31	1	3%	
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47	0	0%	
2.15	Bidang Perhubungan	225	20	9%	
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	80	0	0%	
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	31	16	52%	
2.18	Bidang Penanaman Modal	31	10	32%	
2.19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25	0	0%	
2.20	Bidang Statistik	11	0	0%	
2.21	Bidang Persandian	8	2	25%	
2.22	Bidang Kebudayaan	103	13	13%	

Lanjutan

Kode Urusan	Bidang Urusan	Jumlah List data di SIPD	Jumlah Data Terisi Tahun 2022	Persen (%)	Keterangan
2.23	Bidang Perpustakaan	41	0	0%	
2.24	Bidang Kearsipan	22	8	36%	
3.25	Bidang Keluatan dan Perikanan	225	4	2%	
3.26	Bidang Pariwisata	80	6	8%	
3.27	Bidang Pertanian	373	5	1%	
3.28	Bidang Kehutanan	70	28	40%	
3.29	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	39	18	46%	
3.30	Bidang Perdagangan	49	21	43%	
3.31	Bidang Perindustrian	28	2	7%	
3.32	Bidang Transmigrasi	60	0	0%	

Lanjutan

Kode Urusan	Bidang Urusan	Jumlah List data di SIPD	Jumlah Data Terisi Tahun 2022	Persen (%)	Keterangan
4.01	Sekretariat Daerah	156	0	0%	
4.02.	Sekretariat DPRD	52	0	0%	
5.01	Perencanaan	54	3	6%	
5.02	Keuangan	103	0	0%	
5.03	Kepegawaian	47	0	0%	
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	26	0	0%	
5.05	Penelitian dan Pengembangan	82	0	0%	
5.07	Pengelolaan Penghubung	5	0	0%	
6.01	Inspektorat Daerah	16	0	0%	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	77	0	0%	
Jumlah		4016	499	12%	

Permasalahan

1. Uraian sering terjadi perubahan tanpa ada informasi ke Pemda
2. List Data di E-Walidata banyak yang tidak tersedia datanya di Perangkat Daerah (Produsen Data)
3. Pada E-Walidata saat ini tingkat keterisian hanya sampai tahun 2022

Tindak Lanjut

1. Produsen Data diharapkan untuk mengumpulkan dan updating data pada sistem <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata>
2. Produsen Data diharapkan untuk mengumpulkan dan updating data dukung pada aplikasi Satu Data Jabar (<https://satudata.jabarprov.go.id/>)
3. Produsen Data dapat mengajukan data tambahan jika tidak ada di list data pada sistem E-Walidata dan Satu Data Jabar

TERIMA KASIH